

BAB 6

RINGKASAN

Desa merupakan sebuah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pembangunan desa menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan Indonesia. Saat ini, pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Padahal, permasalahan yang dihadapi oleh desa cukup banyak dan kompleks, salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pembangunan desa dan mengatasi permasalahan yang dihadapi desa, salah satunya program yang dilaksanakan tersebut adalah dana desa. Dana desa merupakan program bantuan keuangan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2024, jumlah anggaran dana desa mencapai 71 triliun rupiah yang diberikan kepada sekitar 75.265 desa di seluruh Indonesia. Hubungan antara dana desa dengan permasalahan lingkungan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Penulis melihat adanya potensi dana desa sebagai instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan lingkungan dari tingkat desa. Hal ini dipicu karena pembangunan di tingkat desa masih minim dalam mempertimbangkan aspek lingkungan dan pembangunan lingkungan dalam pelaksanaannya.

Kabupaten Semarang dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan 3 faktor yaitu (1) Penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang pada bidang lingkungan hidup masih sangat rendah hanya mencapai 2,5-3,5%. Persentase ini masih jauh di bawah hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan anggaran dana desa untuk bidang lingkungan hidup dapat mencapai 20-30%. (2) Sektor pertanian menempati urutan keempat terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Semarang. Sektor pertanian ini sangat bergantung dengan kondisi alam dan lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keberlangsungan sektor pertanian. (3) Lokasi Kabupaten Semarang cukup strategi

berada di antara 3 kota besar yaitu Kota Semarang, Kota Solo, dan Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyerapan dana desa untuk pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang, menganalisis kesadaran stakeholder terhadap pembangunan bidang lingkungan hidup di perdesaan Kabupaten Semarang, dan merancang desain penguatan pembangunan bidang lingkungan hidup melalui dana desa di perdesaan Kabupaten Semarang. Output penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi desa-desa di Kabupaten Semarang dalam merencanakan pembangunan lingkungan dari tingkat desa. Penelitian ini menggunakan mixed-method atau metode campuran. Metode campuran digunakan untuk mengintegrasikan pengolahan data kuantitatif dan data kualitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Semarang yang memiliki 19 kecamatan dan terdiri dari 208 desa. Data penelitian terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada 19 narasumber yang terdiri dari academic (5 orang), business (3 orang), government (7 orang), dan community (3 orang). Data sekunder didapatkan dari hasil studi pustaka melalui beberapa dokumen seperti laporan realisasi anggaran dana desa Kabupaten Semarang, jurnal atau artikel penelitian sebelumnya, regulasi atau peraturan, dan sumber lain yang kredibel. Metode analisis data dibagi menjadi 3 yaitu statistik deskriptif, analisis kualitatif, dan contingent valuation method (CVM).

Total realisasi anggaran dana desa di Kabupaten Semarang sebesar Rp. 588.902.648.631,-. Anggaran dana desa digunakan untuk sekitar 10 kegiatan di tingkat desa. Gambaran umum dana desa di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dengan jumlah anggaran dana desa mencapai Rp. 207.834.538.933,- atau sekitar 35% dari total seluruh anggaran dana desa di Kabupaten Semarang. Posisi kedua ditempati oleh kegiatan bencana, darurat dan mendesak mencapai Rp. 119.810.432.998,- atau sekitar 20%. Sedangkan untuk pembangunan bidang lingkungan hidup menempati urutan kedelapan dengan total anggaran sebesar Rp. 18.449.090.817,- atau sekitar 3%. Rendahnya penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan bidang

lingkungan hidup ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat desa bahwa membangun jalan dan jembatan lebih bermanfaat daripada menyelamatkan lingkungan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman desa terhadap manfaat jangka panjang dalam pembangunan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara rinci, total anggaran dana desa untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebesar Rp. 18.449.090.817,- telah digunakan untuk 5 kegiatan yaitu penyediaan air bersih atau air minum, fasilitas sanitasi atau pengolahan limbah cair domestik, pengelolaan sampah, konservasi hutan atau sejenisnya, dan pengembangan energi terbarukan. Dari kelima kegiatan tersebut, air bersih/air minum menjadi kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dengan anggaran terbesar yaitu sekitar Rp. 11.064.495.036,- (60%) yang digunakan oleh 133 desa. Posisi kedua adalah sanitasi/limbah cair domestik dengan anggaran dana desa sebesar Rp. 3.468.253.200,- (19%) yang digunakan oleh 104 desa. Posisi ketiga adalah pengelolaan sampah dengan anggaran dana desa sebesar Rp. 2.933.269.358,- (16%) yang digunakan oleh 52 desa. Selanjutnya, posisi keempat adalah kegiatan konservasi hutan dengan anggaran dana desa sebesar Rp. 538.126.223,- (3%) yang digunakan oleh 28 desa. Dan terakhir, pengembangan energi terbarukan memiliki anggaran sebesar Rp. 538.126.223,- (2%) yang digunakan oleh 28 desa.

Pembangunan bidang lingkungan hidup itu sendiri merupakan upaya pembangunan desa guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dengan cara menjaga, memperbaiki, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Pembangunan bidang lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti pengelolaan sampah, kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi, dan penghijauan desa. Salah satu aspek penting yang diperlukan dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat mendorong tumbuhnya sikap peduli lingkungan, sehingga pembangunan lingkungan tidak hanya berfokus pada infrastrukturnya saja tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa. Jika kedua hal ini berjalan bersamaan maka akan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ditentukan bahwa pembangunan bidang lingkungan

hidup yang paling dibutuhkan bagi desa-desa di Kabupaten Semarang adalah pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan masalah sampah menjadi masalah yang mendesak dan berhubungan langsung dengan lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi. Sedangkan bagi Kabupaten Semarang, permasalahan sampah yang dihadapi berupa kondisi TPA Blondo yang sudah overcapacity, meningkatnya timbulan sampah akibat konsumsi penduduk dan kunjungan wisata, serta pengelolaan sampah di desa yang belum optimal. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan sampah yang dihadapi oleh Kabupaten Semarang sekaligus mendukung arahan Bupati Semarang untuk melaksanakan tuntas sampah dari desa/kelurahan.

Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dapat diimplementasikan oleh desa-desa di Kabupaten Semarang adalah pengelolaan sampah melalui TPS 3R. TPS 3R memiliki beberapa manfaat seperti mampu mengurangi jumlah timbulan sampah ke TPA sekitar 60-90%, membuat lingkungan lebih bersih dan rapi, manfaat ekonomi mencakup pengurangan biaya operasional pengangkutan sampah ke TPA, menambah pendapatan, hingga membuka lapangan pekerjaan, serta TPS 3R dapat menjadi pusat edukasi lingkungan. Desain TPS 3R dalam penelitian ini dirancang berdasarkan hasil wawancara dan validasi orang yang berkompeten (ahli konstruksi, ahli sampah, dan pengelola TPS 3R). Desain TPS 3R berukuran panjang 20 meter dan lebar 15, sehingga luasnya sekitar 300 m². Luas tersebut mampu mengelola sampah di tingkat desa dengan jumlah 200 KK/rumah. Estimasi biaya pembangunan TPS 3R dalam penelitian ini mencapai Rp. 1.081.000.000,- dengan penggunaan untuk pembangunan gedung TPS 3R, operasional pembangunan gedung TPS 3R, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, hingga biaya operasional pengelolaan sampah melalui TPS 3R untuk 1 tahun pertama. TPS 3R harus dikelola melalui pengurus yang minimalnya terdiri dari ketua, sekretaris/bendahara, operator pengangkutan, dan operator pemilahan. Agar pengelolaan sampah melalui TPS 3R dapat berkelanjutan maka dibutuhkan 3 hal yaitu komitmen, partisipasi masyarakat, dan inovasi.